

LAMPIRAN .
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 31 TAHUN 2020

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PAMOTAN
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penyusunan dokumen perencanaan pada jangka menengah dan tahunan tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah saja namun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga wajib menyusunnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Dokumen perencanaan lima tahunan pada OPD disusun dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) yang mempedomani RPJMD sedangkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan OPD disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang mempedomani RKPD.

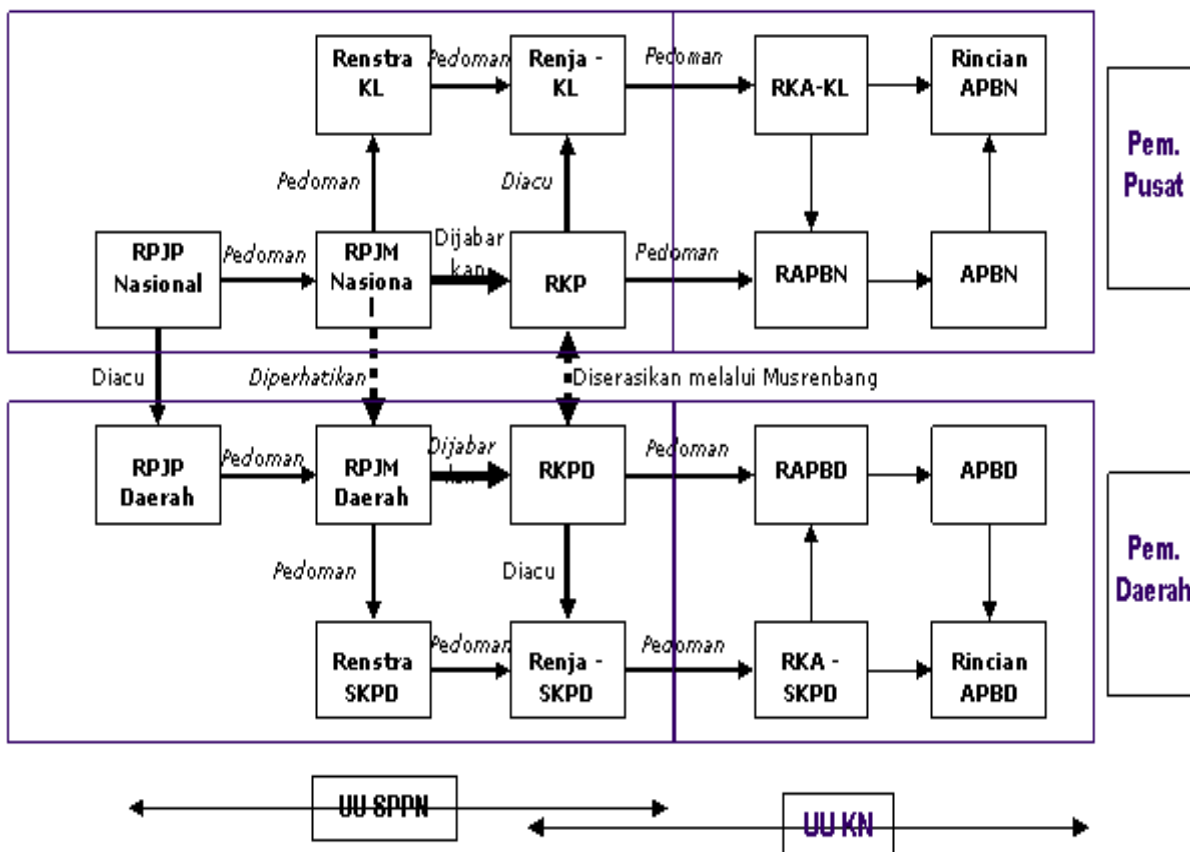
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016, yang telah ditindaklanjuti Perangkat Daerah dengan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, demikian pula Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang. Dokumen RENSTRA Kecamatan Pamotan ini merupakan penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang terpilih.

Berdasarkan hasil pembinaan SAKIP dari KEMENPANRB pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 di Kabupaten Rembang, terdapat ketidaksesuaian Renstra Kecamatan Pamotan meliputi isu strategis belum mengacu RPJMD, rumusan tujuan PD belum mengacu pada sasaran RPJMD, dan rumusan indikator tujuan PD masih *output* belum *outcome*. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian atas Renstra Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang tahun 2016 – 2021.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

Gambar 1.1
Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Selanjutnya Renstra Kecamatan Pamotan tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Pamotan dalam kurun waktu 5 tahun.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pendoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

16. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013- 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021;
22. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standart Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Rembang;
23. Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
24. Peraturan Bupati Rembang nomor 23 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2016-2021

1.3 Maksud Dan Tujuan

Renstra Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 ini disusun dengan maksud mensinergikan tujuan, sasaran, program maupun target-target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021, guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang secara berkesinambungan.

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pamotan Tahun 2016 - 2021 adalah:

1. Sinkronisasi dan penyesuaian dengan kebijakan daerah yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
2. Menjadi payung hukum terhadap renja Kecamatan Pamotan Tahun 2020 dengan tetap menjaga konsistensi terhadap dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 yang secara operasional memuat program dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan dan urusan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pamotan selama kurun waktu Tahun 2016-2021

3. Menjadi tolok ukur penilaian kinerja Camat yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan sampai dengan tahun 2021.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Pamotan Tahun 2016 – 2021 adalah:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Kecamatan Pamotan sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang;
2. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pamotan ;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.4 Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Pamotan

Sistematikan penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Pamotan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN PAMOTAN KABUPATEN REMBANG

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Pamotan
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Pamotan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pamotan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pamotan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pamotan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Provinsi Jawa Tengah
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pamotan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Pamotan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengurai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Pamotan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Memuat indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Memuat tentang penegasan fungsi Renstra yaitu berlaku sebagai acuan dan pedoman bagi setiap jajaran Kecamatan Pamotan serta sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan (*stake holders*).

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PAMOTAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan sebagai bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang camat, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui sekretaris Daerah. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan berkewajiban mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik di Kecamatan, serta memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa.

Disamping itu Camat menjalankan fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih jelasnya penjabaran tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang tersebut diatas dijabarkan lebih detail dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor : 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Camat

a. Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

b. Fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksana fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

a. Tugas Pokok :

Perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan.

b. Fungsi

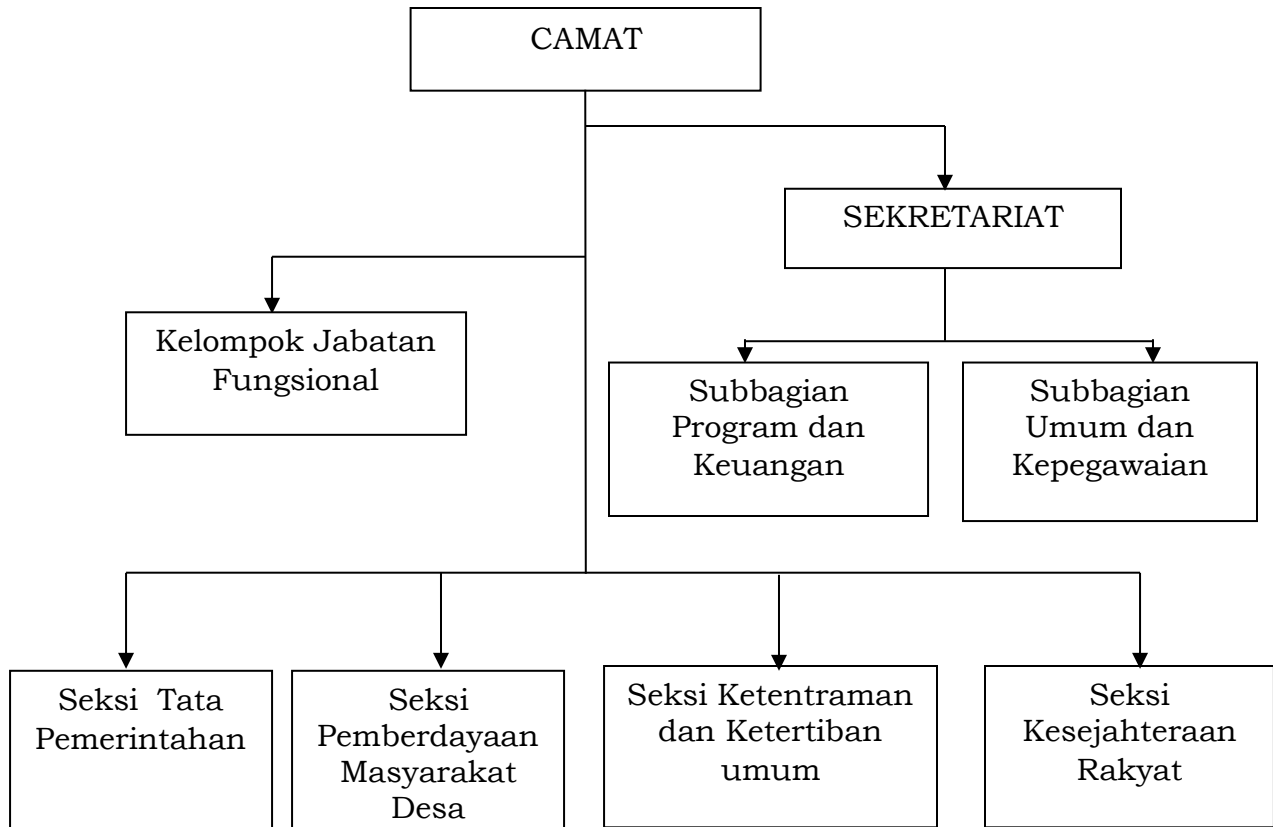
1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
4. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
5. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang –undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan system pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan,
5. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang tata pemerintahan.
6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait penyiapan konsep evaluasi dan rekomendasi anggaran pendapatan belanja desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa..
7. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi kesejahteraan rakyat, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kepemudaan, olahraga, seni dan budaya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja dan transmigrasi, kesehatan, pendidikan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pangan, sosial, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang kesejahteraan rakyat.
8. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi pelayanan, ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, penegakan peraturan perundangan, pembinaan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, penyiapan konsep rekomendasi perijinan, pengawasan kegiatan keramaian dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan hari besar lainnya serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagai urusan otonomi daerah di bidang seksi ketentraman dan ketertiban umum..
11. Kelompok Jabatan Fungsional
Tugas pokok: melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.1.
Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Pamotan
Peraturan Bupati No. 69 tahun 2016



2.2 Sumber Daya Kecamatan Pamotan

a. Sumberdaya Aparatur

Sumber Daya Manusia Kecamatan Pamotan terdiri dari Pejabat Struktural, Pelaksana (PNS), Sekdes (PNS), THL, adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 dan tabel 2.2

Tabel 2.1
Jabatan Struktural Lingkup Kecamatan Pamotan Tahun 2018

No	Jabatan	Pendidikan				Jenis Kelamin		Eselon				Pangkat / Golongan			Ket
		S 2	S 1	D 3	SLT A	Lk	Pr	III a	III b	IV a	IV b	I V	III	I I	
1	Camat	1				1		1				1			
2	Sekcam		1			1			1				1		
3	Kasi Kecamatan		3		1	2	2			4			4		
4	Kasubag Kecamatan	1	1			2					2		2		

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai / Karyawan Lingkup Kecamatan Pamotan tahun 2018

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Pendidikan					PNS Golongan / Ruang				Kontrak / THL	Ket	
		Laki-Laki	Perempuan	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	IV	III	II	I			
1	Kecamatan Pamotan	11	3		2	5	3			1	7	3		3	
2	Sekdes PNS Kec. Pamotan	6					5	1				6			
	Jumlah	17	3		2	5	8	1		1	7	9		3	

b. Sumberdaya Aset / Sarana dan Prasarana

Sedangkan sumberdaya aset/sarpras kelengkapan dan sarana pendukung kerja Kecamatan Pamotan memiliki kekayaan/aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana dalam Tabel Inventaris dalam Tabel 2.3 meliputi :

Tabel 2.3
Daftar Inventaris Sarana Dan Prasarana Kecamatan Pamotan

No	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6
1	Lemari Kayu	7 buah	7 buah	-	
2	Meja Panjang	4 buah	4 buah	-	
3	Papan Visual	5 buah	5 buah	-	
4	Alat Kantor lainnya	1 buah	1 buah	-	
5	Meja Tulis	63 buah	63 buah	-	
6	Mimbar/Podium	1 buah	1 buah	-	
7	Papan Pengumuman	3 buah	3 buah	-	
8	Sepeda Motor	13 buah	13 buah	-	
9	Mesin Ketik Manual	1 buah	1 buah	-	
10	Tiang Bendera	1 buah	1 buah	-	
11	Microphone	1 buah	1 buah	-	
12	Papan Nama Instansi	1 buah	1 buah	-	
13	Meja Podium	1 buah	1 buah	-	
14	Loudspeaker	2 buah	2 buah	-	
15	Lambang Garuda Pancasila	1 buah	1 buah	-	
16	Pesawat Telepon	1 buah	1 buah	-	

No	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6
17	Zice	3 buah	3 buah	-	
18	Kursi Rapat	258 buah	258 buah	-	
19	Monitor	1 buah	1 buah	-	
20	Meja Komputer	3 buah	3 buah	-	
21	Meja Telepon	1 buah	1 buah	-	
22	Meja Tik	1 buah	1 buah	-	
23	Kursi Biasa	3 buah	3 buah	-	
24	Kursi Plastik	180 buah	180 buah	-	
25	Casette Recorder	1 buah	1 buah	-	
26	Personal Komputer lain lain	3 buah	3 buah	-	
27	Camera Elektrik	1 buah	1 buah	-	
28	PC Unit	5 buah	5 buah	-	
29	Lemari Buku unt Perpustakaan	1 buah	1 buah	-	
30	Meja Krja Pgwai Non Struktural	2 buah	2 buah	-	
31	Kursi Tamu	6 buah	6 buah	-	
32	Meja Rapat	2 buah	2 buah	-	
33	Kursi Biasa	1 buah	1 buah	-	
34	Ac Split	5 buah	5 buah	-	
35	Meja Krj Pejabat lain lain	1 buah	1 buah	-	
36	Kursi Krj Pejabat lain lain	1 buah	1 buah	-	
37	Proyektor Attachment	1 buah	1 buah	-	
38	Portable Generating Set	1 buah	1 buah	-	
39	Kursi Puter	6 buah	6 buah	-	
40	AC unit	1 buah	1 buah	-	
41	Laptop	11 buah	11 buah	-	
42	Radio	1 buah	1 buah	-	
43	Printer	1 buah	1 buah	-	
44	Televise	1 buah	1 buah	-	

No	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6
45	Sound system	2 buah	2 buah	-	
46	Kursi krj Pejabat Eslon iv	6 buah	6 buah	-	
47	Kursi Chitose	150 buah	150 buah	-	
48	Finger print	1 buah	1 buah	-	
49	Kursi Krj pejabat Eslon iv	8 buah	8 buah	-	
50	Papan neon BOOK	1 buah	1 buah	-	
51	Reaning Tex	1 buah	1 buah	-	
52	Pagar Depan	1 buah	1 buah	-	

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pamotan

a. Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Pamotan

Dalam upaya peningkatkan pelayanan di tingkat kecamatan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standart Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Rembang. Paten adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. Pelayanan sejenis sebetulnya telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang), yang menangani perijinan dari pendaftaran sampai dengan pencetakannya. Melalui perbup tersebut telah diserahkan beberapa kewenangan bupati kepada camat dalam untuk melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam skema reformasi birokrasi sebagai langkah nyata guna mewujudkan *good governance*. Perubahan mental aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat masyarakat haruslah ditingkatkan dan dipertahankan guna mencapai pelayanan yang efektif, cepat tepat dan murah bagi masyarakat. Perubahan paradigma ini dapat ditempuh melalui optimalisasi potensi sumberdaya aparatur pemerintah dan sumberdaya sarana / prasarana serta sumber dana yang diharapkan dapat terus meningkat setiap tahunnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah

Penetapan indikator tujuan, indikator sasaran, indikator program dan indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berjalan dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan evaluasi program dan kegiatan yang telah dan akan dicapai berdasarkan Rencana kerja tahunan Perangkat Daerah yang telah disusun untuk merelaisasikan target dan sasaran kurun waktu yang telah ditentukan khususnya bidang pelayanan di Kecamatan Pamotan.

Dalam rangka mendukung tercapainya Indikator Kinerja Makro Perangkat Daerah Kecamatan Pamotan menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) langsung kepada masyarakat, dalam setiap penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.

b. Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pamotan

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pamotan

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat Program yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, dapat ditentukan program yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Setelah mengetahui program tersebut, barulah ketahui rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi kegiatan yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kantor Camat Rembang berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja utama secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2016-2021 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pamotan menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKJIP Kecamatan Pamotan tahun 2019 Sebagaimana terlihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4

**Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pamotan
Tahun 2017-2019**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian	% Capaian	RPJMD	
		2019	2019	2019	2018	2017	Target akhir 2021	% Capaian 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan kualitas pelayanan Publik Kecamatan Pamotan	IKM Kecamatan Pamotan	75	77,07	103%	100%	100%	80	93,98%
Meningkatkan Kinerja dan kapasitas pemerintah Desa	% Desa maju & mandiri	4%	4,76%	119%	100%	100%	5	95,2%
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa	% Desa dengan nilai swadaya Masyarakat lebih dari Rp.5 jt	50%	50%	100%	100%	100%	60%	83,3%

2. Capaian Indikator Kinerja Program

Pencapaian kinerja indikator program Kecamatan Pamotan tahun 2016-2018 yang tercermin dalam pelaksanaan program, dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.5
Pencapaian Indikator Kinerja Program Kecamatan Pamotan
Tahun 2016-2018

NO	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra OPD Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Tingkat Capaian pada Tahun ke-		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
(1)		(2)		(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	95	100	100	95	100
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	% sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	60	100	70	60	98	70	100	98	100
3	Program Peningkatan fungsi pemerintah desa	% terselenggaranya pemdes	%	75	100	85	75	99,4	85	100	99,4	100
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	% kehadiran ASN Tepat Waktu	%	70	100	77	70	50	77	100	50	100
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	%	75	100	85	75	100	85	100	100	100

3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Tabel 2.5
Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kecamatan Pamotan

NO	Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
				2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
1	Terbayarnya Rekening telepon, Air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	68%	74%	100%	80,13 %
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	85%	100%	100%	74,67 %
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersediaanya Jasa Administrasi Keuangan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya honor tenaga kebersihan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	99%	99%	99%	99,165
5	Tersedianya Alat Tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	91%	99%	99%	89,60 %
6	Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
7	Penyediaan komponen instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	bln	12	12	12	12	12	12	12	12	83%	100%	100%	100%

Tabel 2.5
Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kecamatan Pamotan

8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya jasa service	unit	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	bln	1 2	1 2	1 2	12	1 2	1 2	1 2	12	95%	100%	100%	100%
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	bln	1 2	1 2	1 2	12	1 2	1 2	1 2	12	96%	94%	100%	100%
12	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman dalam rapat	bln	1 2	1 2	1 2	12	1 2	1 2	1 2	12	100%	100%	100%	
13	Penyediaan Jasa Administrasi kantor/kebersihan	Tersedianya jasa administrasi kantor/kebersihan	bln	1 2	1 2	1 2	12	1 2	1 2	1 2	12	81%	100%	100%	97,47 %
14	Rapat Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bln	-	-	-	1 2	-	-	-	12	-	-	-	99,19 %

Tabel 2.5
Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kecamatan Pamotan

15	Rapat Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bln	1 2	1 2	1 2	12	1 2	1 2	1 2	12	99%	100%	100%	85%
15	Penyediaan jasa sewa rumah gedung/gudang/parker/lahan	Terlaksananya sewa rumah gedung/gudang/parker/lahan	bln	12	-	-	-	12	-	-	-	50%	-	-	-
16	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Pembelian mebeliur dan tabung gas	set	2	-	-		2	-	-		100%	-	-	-
17	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional	Pembelian sepeda motor	bh	3	2	2	-	3	2	2-	-	100%	100%	100%	-
18	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pmbelian AC	Bh/unit	3	-	-		3	-	-		100%	-	-	-
19	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pembelian almari arsip	bh	-	3	-		-	3	-		-	88,63%	-	-
20	Pengadaan perlengkapan kantor	Pembelian rangka besi tempat spanduk, AC	Set/bh	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	96,82%
22	Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan rumah tangga	Pembelian meteran dorong,tulisan berjalan,AC,Almari dapur,Almari Es	set	-	6	-	-	-	6	-	-	-	98,50%	-	-

Tabel 2.5
Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kecamatan Pamotan

23	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya gedung kantor yang indah dan representatif	unit	1	1	1		1	1	1		100%	98%	98%	
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Berfungsinya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 dengan baik	unit	12	12	12		12	12	12	12	100%	98%	98%	95
25	Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Terpeliharanya komputer dengan baik	bln	1 2	1 2	1 2		1 2	1 2	1 2		49%	100%	100%	
26	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung	Terpeliharanya gedung Pertemuan dengan keadaan baik	keg	1	1	1		1	1	1		99%	99%	99%	
27	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Trrpeliharanya Rumah Dinas	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	99%	-	-	-
28	Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor	Berfungsinya gedung kantor	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	99%	-	-	-
	Rehabilitasi Lingkungan kantor/Rumah Jabatan/Dinas	Pembuatan tempat parkir dan akses jalan	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	99%	-	-	-
31	Penataan lingkungan kantor/Rumah Jabatan / Dinas	Terpelihara lingkungan kantor baik (pavingisasi,talut)	Keg/p kt	-	1	-	1	-	1	-	1	-	99,20 %	-	96,78

Tabel 2.5
Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kecamatan Pamotan

35	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Pembelian pakaian batik	bh	25	25	-	-	2 5	25	-	-	100%	100%	-	-
36	Penyusunan Renstra Renja	Penyusunan dokumen	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
37	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBD	Koordinasi lintas sektoral	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
38	Penunjang Pemilihan Kepala Desa	Terfasilitasinya Pemilihan Kepala Desa	keg	1	1	1		1	1	1		100%	100%	100%	96,27%
39	Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD)	Tertib administrasi Desa	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
40	Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya gebyar PAUD	keg	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100%
41	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan desa	bln	-	-	-	12	-	-	-	1 2	-	-	-	100%
42	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Penyusunyusunan RPJM Desa sesuai rencana	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
	Perlindungan Anak	Terlaksananya rakor KPAD	keg	-	1	1	1	-	1	1	1	-		86,67%	89%
43	Verifikasi APBDesa	Administrasi keuangan desasesui rencana	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-

Tabel 2.5
Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kecamatan Pamotan

44	Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)	Terlaksananya keg PKH	keg	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100%
45	Penguatan Pokjanal Posyandu	Rapat Tim	keg	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	84%
46	Fasilitasi Bintek dan Pelatihan Penyusunan Profil Desa	Tersusunnya profil desa	keg	1	1	1		1	1	1		100%	100%	100%	66%
47	Pendataan Lembaga Madin TPQ	Meningkatnya fungsi ormas	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
48	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	terfasilitasinya Kegiatan Keagamaan	keg	1	-	-	-	1	-	-	-	100%	-	-	-
49	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Kenegaraan	Terselenggaranya upacara HUT RI	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
50	Fasilitasi PKK	Terfasilitasinya kegiatan PKK	keg	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%
51	Fasilitasi Penunjang kegiatan Kesejahteraan Rakyat	Terfasilitasinya kegiatan Keagamaan	keg	1	1	1	6	1	1	1	6	100%	99,75%	100%	95,03%
52	Fasilitasi & Koordinasi Pengamanan Masyarakat Wilayah Kecamatan	Terfasilitasinya hansip	keg	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100%

Tabel 2.5
Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kecamatan Pamotan

53	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan di tingkat Kecamatan	Meningkatnya koordinasi karang Taruna	keg	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100%
54	Validasi Data Miskin Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Rakor MPM-SLRT	keg	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	100%
55	Kegiatan Pembinaan anggota Hansip/Linmas	Meningkatnya kualitas hansip desa	keg	1	-	-	1	1	-	-	1	100%	-	-	93,76%
56	Penyelenggaraan Pengawasan Pilkades	Terselenggaranya pilkades	keg	-	1	1	1	-	1	1	1	-	100%	100%	96,27%

Adapun secara garis besar, pelayanan administrasi di Kecamatan Pamotan terbagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu pelayanan Perijinan dan Non Perijinan:

- 1) Kelompok Perijinan terdiri dari Ijin Usaha Mikro (IUM) .
 Pelayanan perijinan ini mulai dilimpahkan oleh bupati kepada camat sejak tahun 2015. Dan mulai efektif berlaku sejak Januari tahun 2016. Yang masuk dalam katagori IUM ini besar modal usahanya sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Outputnya adalah Surat Ijin Usaha Mikro yang dapat di tandatangani oleh Camat . Pelayanan IUM diberikan untuk antara lain : Ijin mendirikan Warung makan, Warung Kopi, toko kelontong, bengkel, sektor jasa foto copy, warnet, dan home industri lainnya.
- 2) Kelompok Non Perijinan
 - a) Pelayanan Rekomendasi
 Pelayan rekomendasi ini pada prinsipnya memberikan rekomendasi dan atau legalisasi surat menyurat yang dibutuhkan oleh masyarakat yang meliputi : Legalisasi pengajuan Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP), Ijin HO, Ijin keramaian, SKTM, Pindah penduduk keluar, Nikah, Domisili, Alih fungsi lahan pertanian Surat Keterangan Waris dll.
 - b) Pelayanan Administrasi Kependudukan
 Pelayanan administrasi kependudukan ini meliputi penerbitan surat pindah antar kecamatan, entri data dan perekaman E KTP, Pencetakan KK. (Kartu keluarga) Pelayanan Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Meliputi beberapa pelayanan akta – akta seperti Pembagian Harta Bersama (PHB) , Akta Jual Beli, Waris, Hibah.dll.

Untuk lebih jelasnya daftar pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan Pamotan dapat dilihat pada tabel 2.5 – 2.7 kurun waktu 2016 – 2018.

Tabel 2.7
Pelayanan Non Perijinan

NO.	JENIS PERIJINAN	TAHUN		
		2016	2017	2018
1	Pindah Penduduk	474	462	453
2	SKCK	674	603	658
3	Perijinan HO	40	32	38
4	Perijinan IMB	12	21	14
5	Perijinan Keramaian	88	93	108
6	Legalisasi Surat Keterangan	1561	1568	1566
7	Legalisasi Nikah	610	668	691
8	KK	4644	4869	4795
TOTAL		8103	8316	8323

Tabel 2.8
Pelayanan Perijinan Ijin Usaha Mikro (IUM) Tahun 2018

NO	JENIS IUM	JUMLAH
1	JASA	2
2	PERDAGANGAN	12
3	TOKO KLONTONG	19
4	WARUNG MAKAN	4
5	HOME INDUSTRI	21
JUMLAH		58

Tabel 2.9
Pelayanan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pamotan

NO	JENIS PELAYANAN	TAHUN		
		2016	2017	2018
1	AKTA JUAL BELI	8	10	4
2	AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA	1	-	2
3	AKTA HIBAH	4	2	1
4	AKTA WARIS	2	-	-
TOTAL		15	12	7

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pamotan.

Berdasarkan evaluasi kinerja Kecamatan Pamotan serta upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governace*) dan pemerintahan yang *bersih (clean governance)* serta berdasarkan hasil analisis terhadap laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Pamotan Tahun 2016, maka dapat dikemukakan beberapa tantangan dan peluang Kecamatan Pamotan kurun lima tahun mendatang sebagai berikut :

a. **Tantangan** Terhadap Pengembangan Pelayanan di Kecamatan adalah:

1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
2. Dinamika perkembangan masyarakat dilain daerah secara tidak langsung berpengaruh terhadap pola pikir dan persepsi masyarakat.
3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, menuntut adanya pemahaman dan penyesuaian dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
4. Masih rendahnya penguasaan teknologi bagi Perangkat Desa dan Koordinasi dengan Perangkat Desa belum bisa optimal
5. Jumlah desa yang harus dilayani cukup banyak (21 desa)
6. Peningkatan Kualitas aparat kecamatan dan pemerintah desa dalam implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Perkembangan ekonomi global yang sangat cepat seperti Pelaksanaan Era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang perlu dipersiapkan dan diantisipasi sejak dini oleh masyarakat;
8. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
9. Rendahnya partisipasi dan peranserta masyarakat dalam pembangunan
10. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangkat daerah.

b. **Peluang** Terhadap Pengembangan Pelayanan

1. Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta pelimpahan Kewenangan dari pemerintah dan pemerintah daerah/Bupati yang didelegasikan kepada Camat
2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Pemberian otonomi yang luas disertai dukungan pendanaan dari APBD melalui ADD kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Dukungan pendanaan dari pemerintah daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan;
5. Semakin meningkatnya anggaran Pemerintah yang dialokasikan kepada Desa baik berupa Dana Desa maupun dana lainnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pamotan

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pamotan maka diperlukan tentang potret Kecamatan Pamotan saat ini. Adapun potret dan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pamotan adalah sebagai berikut :

3.1.1. Bidang Pemerintahan

a. Kondisi

1. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Kecamatan
2. Masih rendahnya sumber daya manusia perangkat desa
3. Belum efektifnya pengawasan melekat
4. Kurang validnya data yang mendukung perencanaan program pembangunan di wilayah kecamatan
5. Rendahnya kualitas dan akurasi data yang ada di desa
6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam masalah hukum

b. Permasalahan

1. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif
2. Belum memadainya Sarana prasarana penyelenggaraan pelayanan PATEN
3. Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum merata
4. Rendahnya partisipasi pemer
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Desa secara berkala dan terintegrasi;
6. Belum adanya sistem penyediaan basis data kependudukan yang terintegrasi antara desa dan kecamatan;
7. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat

3.1.1. Bidang Ekonomi

a. Kondisi Ekonomi

1. Menurunnya daya dukung potensi sumber daya alam
2. Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah
3. Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan produk luar (kualitas dan kuantitas)
4. Penjualan hasil pertanian belum optimal
5. Potensi industri kecil terutama olahan gula dan kecap
6. Potensi budidaya tembakau

b. Permasalahan

1. Minat pemuda terhadap pertanian semakin menurun
2. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan masyarakat
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pengembangan ekonomi pedesaan antar pemerintah desa dengan perangkat daerah maupun stake holder/pelaku usaha
4. Belum adanya validasi data potensi pertanian maupun Industri rumahan secara berkala baik di desa maupun tingkat Kecamatan.

3.1.2. Bidang Fisik dan Sarana Prasarana

a. Kondisi Saat ini

1. Masih adanya beberapa ruas jalan yang belum memadai sebagai fasilitas penghubungan antar desa maupun kecamatan
2. Sebagian Desa termasuk kategori daerah rawan kekeringan

b. Permasalahan

1. Diperlukan pelebaran jalan, normalisasi dan perbaikan geometri jalan terutama di daerah perbatasan
2. Masih terbatasnya sarana prasarana pengolahan air.
3. Masih banyak jalan lingkungan dan desa dengan kondisinya belum memadai

3.1.1. Bidang Sosial Budaya

a. Kondisi Saat Ini

1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
2. Masih banyaknya pengangguran
3. Masih adanya sarana prasarana sekolah yang kurang memadai
4. Masih banyaknya kasus penyakit menular;
5. Masih adanya kasus gizi buruk
6. Adanya beberapa desa yang memiliki potensi seni tari/ketoprak

b. Permasalahan

1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin yang belum terfasilitasi.
2. Kurangnya minat anak untuk melanjutkan pendidikan berbasis lapangan kerja.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya penyehatan lingkungan dan masyarakat.

Tabel 3. 1.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Pamotan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Rendahnya kualitas pelayanan publik	a. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif; b. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Kecamatan	a. Belum optimalnya pengawasan melekat b. Belum dilaksanakan review SOP Pelayanan c. Belum memadainya Sarana prasarana penyelenggaraan pelayanan PATEN d. Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS dan kinerja PNS e. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur kecamatan f. Minimnya Aparatur yang menguasai IT g. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Desa secara berkala dan terintegrasi; h. Belum adanya sitem penyediaan basis data kependudukan yang terintegrasi antara desa dan kecamatan
2.	Rendahnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan desa	a. Rendahnya kinerja Pemerintah Desa b. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan	a. Kurangnya Pembinaan dan pengawasan bagi Pemerintah Desa b. Belum optimalnya kemampuan lembaga pemerintahan desa c. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan masih

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		c. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan masyarakat d. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat	kurang d. Masih banyaknya perangkat desa yang kurang kompeten e. Kurangnya pembinaan dan pendampingan bagi lembaga desa (bidang sosial, ekonomi dan budaya) f. Minimnya kemampuan dan ketrampilan aparat Linmas

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 merupakan gambaran pernyataan kondisi Kabupaten Rembang yang dicita-citakan pada tahun 2021. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran yang terukur yang menggambarkan upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut. Misi selanjutnya dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi. Adapun Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu: **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT REMBANG YANG SEJAHTERA, MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA, YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEWIRUSAHAAN”**.

Adapun maksud visi tersebut dijelaskan sebagaimana dibawah ini:

3.2.1 Masyarakat sejahtera

Masyarakat dikatakan sejahtera apabila terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu, baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan, selain itu terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan terdidik dapat dicapai melalui peningkatan kualitas SDM yang memperoleh akses, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya untuk mewujudkan kemampuan ekonomi masyarakat dicapai dengan memprioritaskan pembangunan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Disisi lain dapat diwujudkan melalui sistem hukum, politik, sosial dan budaya.

3.2.2 Semangat Kebersamaan

Semangat adalah keadaan pikiran batin tergerak untuk melakukan suatu tindakan (kekuatan/dorongan dari dalam) (Kamus besar Bahasa Indonesia). Jadi semangat itu memiliki fungsi sebagai penggerak batin untuk bertindak. Apabila kita memiliki semangat bagus maka sikap dan perilakunya biasanya terlihat dinamis.

Sedangkan kebersamaan adalah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan/persaudaraan, lebih dari sekedar bekerjasama atau hubungan profesional saja. Sehingga semangat kebersamaan disini mengandung semangat bersama dalam harmoni kerja membangun kabupaten rembang.

Pembangunan yang dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan dan tantangan, dengan membentuk perilaku yang menjunjung tinggi nilai nilai

kemanusiaan, masyarakat yang demokratis dan beradab serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu maka diperlukan kebersamaan sikap kegotongroyongan (kerjasama), keterbukaan dan saling menghargai (toleransi) yang selalu ditumbuh kembangkan. Pembangunan itu mempunyai semangat pembangunan menuju Rembang yang “*madani*”. dalam Falsafah **Rembang Madani** menjadi hal penting yang harus terus ditanamkan di berbagai lapisan masyarakat sebagai sebuah pendidikan karakter baik dalam kerangka pendidikan formal maupun pendidikan nonformal (dalam keluarga)

3.2.3. Pemberdayaan Masyarakat

Proses pembangunan dimana masyarakat menjadi subyek pembangunan yaitu masyarakat yang berinisiatif memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki kondisi dan situasi secara mandiri. Membangun masyarakat bukan semata mata mengintroduksi dan mengimplementasikan permasalahan ekonomi dan teknologi tetapi lebih pada persoalan harkat martabat manusia. Membangun masyarakat terkait dengan memerangi kemiskinan dan kesenjangan, juga mendorong masyarakat menjadi lebih aktif dan penuh inisiatif. Pemberdayaan atau pembangunan daerah seyogyanya diupayakan menjadi prioritas yaitu bentuk kontribusi riil untuk pelayanan dasar, aspirasi masyarakat yang terefleksi pada prioritas program pembangunan daerah, dan keterkaitan dalam perekonomian dan politik. Yang mana kesemuanya diarahkan untuk merubah kehidupan masyarakat terutama kaum miskin menjadi lebih baik.

3.2.4 Kewirausahaan

Kewirausahaan adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan suatu yang baru dengan cara kreatif dan atau penuh inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan memberikan nilai tambah. Kewirausahaan memiliki proses yang dinamis untuk menciptakan sesuatu yang disertai tenggang waktu, modal, sumber daya dan juga resiko. Disini diperlukan suatu keberanian dalam diri individu untuk melakukan tindakan membangun usaha melalui proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan menemukan ide inovatif, peluang serta cara dalam menjalankan dan menciptakan usaha baru. Untuk menjawab pembangunan kewirausahaan adalah dengan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, dinamis, serta memiliki integritas dan komitmen terhadap kemajuan. Pembnagunan kewirausahaan sebagai motor penggerak untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat lingkungannya, memajukan perekonomian daerah, memenuhi macam macam produk dan adanya jasa.

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 memiliki keterkaitan dengan Visi RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 yaitu “**REMBANG MAJU, MANDIRI dan SEJAHTERA**”. Makna kata **SEJAHTERA** dalam visi jangka panjang adalah sejahtera dalam jasmani dan rohani. Sejahtera dalam kebutuhan jasmani ini dimaksudkan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Rembang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, papan dan tingkat pendidikan yang memadai. Kondisi ini terindikasikan oleh tingginya pendapatan per kapita; tingginya Angka Partisipasi Pendidikan di segala jenjang pendidikan; menurunnya jumlah penduduk miskin; tingginya persentase keluarga dengan perumahan layak; meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak; dan meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial. Kondisi masyarakat yang sejahtera juga ditandai oleh terciptanya kondisi aman, tenteram, tertib dan damai. Sejahtera dalam kebutuhan rohani mengandung makna kehidupan masyarakat yang agamis, yaitu terwujudnya masyarakat yang beriman, bertaqwa dalam menjalankan ibadah yang dianutnya, berilmu dan berakhlak mulia dan rukun diantara sesama pemeluk agama serta memiliki toleransi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat yang harmonis.

Dengan demikian kondisi masyarakat sejahtera yang ingin dicapai dalam RPJMD Tahun 2016-2021 ini adalah masyarakat sejahtera yang memiliki ciri ciri sebagaimana dimaksud dalam dokumen RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025.

Berangkat dari pemahaman diatas, maka untuk mencapai Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 tersebut, akan ditempuh melalui tujuh (7) misi pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah.
2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.
4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan.
6. Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan.
7. Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.

1.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011- 2031. Penyusunan tata ruang dan wilayah di Kabupaten / Kota berdasarkan amanat pasal 25 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Penyusunan RT RW, harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional; rencana tata ruang wilayah provinsi; pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Berdasarkan pasal (4) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011- 2031 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah : untuk mewujudkan penataan ruang wilayah daerah Rembang sebagai kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan. Kebijakan penataan ruang wilayah daerah tersebut meliputi:

- (a) pengembangan potensi sektor pertanian dibagian tengah dan selatan
- (b) pengembangan potensi sektor perikanan kelautan di bagian utara;
- (c) pengembangan potensi sektor pertambangan;
- (d) pengembangan potensi sektor industri
- (e) pengembangan dan pemanfaatan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah;
- (f) pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
- (g) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Rembang ditempuh melalui strategi pengembangan potensi masing masing serktor yang meliputi :

- 1) Strategi pengembangan potensi sektor pertanian dibagian tengah dan selatan terdiri dari
 - a. Mengembangkan kawasan produksi pertanian;
 - b. Mengembangkan kawasan agropolitan;
 - c. Mengembangkan produk unggulan perdesaan; dan
 - d. Mengembangkan prasarana dan sarana kawasan perdesaan.
- 2) Strategi pengembangan potensi sektor perikanan dan kelautan di bagian utara meliputi:

- a. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan budidaya;
 - c. Mengembangkan kawasan wisata bahari terpadu;
 - d. Mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan perikanan;
 - e. Mengembangkan kawasan pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum;
 - f. Mengembangkan kawasan pesisir kabupaten sebagai kota pantai unggulan;
 - g. Menetapkan dan mengembangkan kawasan minapolitan;
 - h. Mempertahankan luasan lahan perikanan darat yang telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan;
 - i. Mengembangkan kawasan minapolitan yang meliputi subsistem hulu, subsistem usaha perikanan, subsistem hilir dan subsistem penunjang; dan
 - j. Mengembangkan sentra-sentra produksi dan usaha berbasis perikanan, dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi
- 3) Strategi pengembangan potensi sektor pertambangan
 - a. Mengkaji kawasan potensi pertambangan dan zonasi wilayah pertambangan;
 - b. Mengelola kawasan peruntukan pertambangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Merehabilitasi dan merevegetasi kawasan bekas pertambangan; dan
 - d. Mengelola lingkungan sekitar kawasan peruntukan pertambangan.
 - 4) Strategi pengembangan potensi sektor industri meliputi :
 - a. Mengembangkan kawasan peruntukan industri yang terletak di semua wilayah kecamatan;
 - b. Membangun kawasan industri Kabupaten Rembang; dan
 - c. Mengembangkan dan pemantapan klaster industri.
 - 5) Strategi pengembangan dan pemantapan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah meliputi :
 - a. Mengembangkan dan memantapkan sistem pusat kegiatan;
 - b. Mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi;
 - c. Mengembangkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air;
 - d. Mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan;
 - e. Mengembangkan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; dan
 - f. Mengembangkan sistem jaringan prasarana lingkungan.
 - 6) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara meliputi :
 - a. Mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
 - b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar KSN untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Keamanan;
 - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar KSN dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - e. Turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Struktur ruang daerah Kabupaten Rembang meliputi

(a) Sistem pusat kegiatan dan

(b) sistem jaringan prasarana wilayah

Sistem pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan.

1. Sistem Perkotaan meliputi :

- a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kecamatan Pamotan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- b. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) adalah PPK yang dipromosikan menjadi PKLp yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, yang meliputi :Perkotaan Lasem; Perkotaan Pamotan; dan Perkotaan Kragan.
- c. Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, yang meliputi : Perkotaan Rembang; Perkotaan Sluke; Perkotaan Kaliori; Perkotaan Rembang; Perkotaan Sumber; Perkotaan Bulu; Perkotaan Gunem; Perkotaan Sedan; Perkotaan Sale; dan Perkotaan Sarang.

Berdasarkan telaahan RT RW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 maka Kecamatan Pamotan Masuk dalam kategori pusat kegiatan local promosi (PKLp).PKLp Rembang sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Pamotan, pusat permukiman, pengembangan perikanan dan kelautan, pertanian dan kehutanan, industri dan pertambangan. PKLp Kragan saat ini telah menjadi simpul dan pusat pelayanan terhadap wilayah kecamatan sekitarnya dan ke depan mempunyai peran strategis

menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah utara bagian timur Kabupaten Rembang. (Lampiran VIII Perda RT RW)

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah sebagai implikasi RT RW dan KLHS adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Pamotan yang Mempengaruhi Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Ket.
1	Eksistensi keberadaan Kantor Kecamatan Pamotan sebagai tempat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Sarana dan Prasarana Infrastruktur pelayanan publik yang kurang memadai	
2	Penetapan perda rencana tata ruang dan wilayah sebagai pedoman guna mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor dan ruang wilayah yang merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha	Rendahnya kesadaran akan arti pentingnya penataan ruang dan pemanfaatan ruang sesuai Perda RTRW yang ditetapkan	
3	Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Keterbatasan SDM aparatur dan infrastruktur Sarpras penunjang pelayanan	
4	<i>Sustainable devolepment</i> (pembangunan berkelanjutan)	Kurangnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan	
5	Pengembangan potensi pertanian dan perkebunan	Kurangnya pembinaan dan pendampingan dalam pengolahan hasil pertanian dan perkebunan	
6	Ketahanan pangan dan energi	Perubahan alih fungsi lahan	

3.4 TELAAHAN RENSTRA K/L

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri. Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerjayang secara konsisten dan penuh tanggung jawab harus bersinergi guna mewujudkan Visi dimaksud.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan

kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.

2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 dan peraturan perundang-undangan arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan 10 Arah Kebijakan dan Strategi, diantaranya adalah kebijakan ke-7 sebagai berikut:

Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah, melalui strategi:

- a. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;
- b. Penguatan kelembagaan PTSP di Daerah;
- c. Peningkatan kualitas dan cakupan daerah yang menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- d. Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM;

Penjabaran operasional dari kebijakan dan strategi di atas adalah Mendorong dan memfasilitasi terwujudnya pelayanan publik yang "Menghadirkan Negara sedekat mungkin dengan masyarakat", diantaranya seperti dalam bidang perizinan dengan membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di seluruh daerah serta pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) guna mereduksi hambatan-hambatan birokratis.

Adapun Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan oleh 12 Program dan 75 Kegiatan, diantaranya yang berhubungan dengan tupoksi kecamatan yaitu **Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**, dengan sasaran program **Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan, pelayanan publik dan pembangunan Nasional, serta mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada**. Program ini dijabarkan ke dalam 7 Kegiatan, diantaranya yang terkait dengan tupoksi kecamatan yaitu Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SiAK) Terpadu dengan sasaran kegiatan yaitu terbangunnya sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) untuk pelayanan KTP-el di daerah, serta tersedianya database yang akurat dan terpadu. dengan indikator kegiatan yaitu Terbangunnya sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) untuk pelayanan KTP-el di daerah, serta tersedianya database yang akurat dan terpadu.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Pamotan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L :

1. Belum semua aparat Kecamatan Pamotan mendapatkan diklat teknis dan Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana Kantor secara keseluruhan ;
3. Belum optimalnya peran serta dan partisipasi Pemerintah desa maupun masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan perdesaan;
4. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi (Perangkat Daerah maupun UPT) yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Maka perumusan isu strategis di Kecamatan Pamotan adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas pelayanan publik;
2. Rendahnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021, Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

A. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, adalah :

“ Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan”.

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat dalam misi pertama RJPMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan good governance.

Tujuan sebagaimana tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pamotan seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Dalam hal ini Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang wajib menjadi koordinator yang mampu menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kecamatan Pamotan yang baik melalui pemberian pelayanan bagi masyarakat yang prima, mewujudkan keberdayaan masyarakat dan menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Rembang dapat tercapai.

B. Sasaran

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang menetapkan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappaeda dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Pamotan selama tahun 2016-2021, dijabarkan sebagai berikut:

“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan”.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang tahun 2016 – 2021, dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pamotan
Tahun 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KINERJA TUJUAN / SASARAN					
			REALISASI				TARGET	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	na	na	na	na	80	85
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	na	na	na	na	2,00	3,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas lingkup birokrasi, sistem manajemen, sarana dan prasarana penunjang, sumberdaya serta pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan kebijakan Kecamatan Rembanb dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat, dengan kebijakan:
 - a. Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)
 - b. Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan di Wilayah Kecamatan
2. Meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa, dengan kebijakan:
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - b. Fasilitasi Bintek dan Pelatihan Penyusunan Profil Desa
 - c. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan dan pemuda dalam menunjang pembangunan di wilayahnya, dengan kebijakan:
 - a. Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan
 - b. Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda , Olah Raga dan Seni Budaya
4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana, dengan kebijakan:
 - a. Pembinaan Hansip Inti Dinas / Instansi Matrik Kecamatan
 - b. Fasilitasi & Koordinasi PAM wilayah kecamatan

Program- program yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD Kantor Kecamatan Rembanb ini adalah program yang dianggap strategis, mempunyai dampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Satker, sehingga tidak termasuk program lain yang secara rutin dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Pamotan.

Sinkronisasi Strategi dan kebijakan Kecamatan Pamotan dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Rembang tahun 2016 – 2021 sebagaimana terdapat dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang
Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan sistem pelayanan publik	1 Optimalisasi Implementasi SOP Pelayanan Publik 2 Peningkatan dukungan administrasi perkantoran 3 Peningkatan dukungan ketercukupan sarpras penunjang PATEN 4 Optimalisasi dukungan SDM dan inovasi pelayanan publik
		Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat	5 Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) 6 Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan di Wilayah Kecamatan
		Meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa	7 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 8 Fasilitasi, BinteK dan Pelatihan Penyusunan Profil Desa 9 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
		Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam menunjang pembangunan di wilayahnya	10 Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 11 Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan 12 Pembinaan dan Pendampingan Lembaga Desa (Sosial, Ekonomi dan Budaya)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
		Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana	13 Pembinaan Hansip Inti / Linmas Inti 14 Fasilitasi & Koordinasi PAM wilayah kecamatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Rembang.

Adapun rincian program dan kegiatan yang mendukung fungsi urusan Penunjang Pemerintah Kecamatan pada Kecamatan Pamotan tahun 2020 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan perangkat Daerah
 - a. Peningkatan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum
 - b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur
 - d. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan keuangan
2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
 - b. Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja perangkat daerahProgram Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik
 - a. Pengelolaan keterbukaan Informasi Publik
3. Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan ketentraman masyarakat
 - a. Fasilitasi Penyekenggaraan Pemerintahan Desa / kelurahan
 - b. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat Desa
 - c. Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
 - d. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Pamotan
Tahun 2016-2019

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
			capaian	Rp	capaian	Rp	capaian	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Program Pelayanan Administrasi	% Pemenuhan layanan administrasi	100	100		100		100		100			
Penyediaan jasa komunikasi SDA dan listrik	Terbayarnya Rekening telepon, Air dan listrik		12 bl	24.000.000	12 bl	24.000.000	12 bl	24.000.000	12 bl	24.000.000	72 bl	96.000.000
Penyediaan Jasa Administrasi	Terbayarnya Honorarium Penatausahaan		12 bl	38.450.000	12 bl	74.000.000	12 bl	49.000.000	12 bl	74.000.000	72 bl	235.450.000
Penyediaan jasa Kebersihan	Terfasilitasinya jasa Kebersihan		12bl	12.000.000	12 bl	48.000.000	12 bl	48.000.000	12 bl	48.000.000	72 bl	156.000.000
Penyediaan Alat Tulis	Tersedianya ATK		12bl	20.950.000	12 bl	17.500.000	12 bl	20.000.000	12 bl	15.000.000	72 bl	73.450.000
Penyediaan Barang Cetakan	Tersedianya jasa Foto Copy		12 bl	8.002.000	12 bl	5.000.000	12 bl	4.000.000	12 bl	5.000.000	72 bl	22.002.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan listrik dan elektronik		12 bl	2.000.000	12 bl	5.000.000	12 bl	4.000.000	12 bl	5.000.000	72 bl	16.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan Studio Visual/TV		2 bh	- 14.650.000	12 bl	10.000.000	12 bl	9.000.000	12 bl	10.000.000	2 bh	13.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang	Langganan Surat Kabar		12 bl	3.480.000	12 bl	3.000.000	12 bl	3.000.000	12 bl	3.000.000	72 bl	12.480.000
Penyediaan makanan dan	Tersedianya makanan dan		12 bl	25.020.000	12 bl	20.000.000	12 bl	18.000.000	12 bl	20.000.000	72 bl	83.020.000
Rapat Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya perjalanan dinas		12 bl	17.200.000	12 bl	18.000.000	12 bl	16.000.000	12 bl	25.000.000	72 bl	153.800.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
			capaian	Rp	capaian	Rp	capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Parkir/lahan													
Program Peningkatan Sarana dan	% sarana prasarana aparatur dalam	60	60		65		70		75		85		
Pengadaan kendaraan	Terpenuhinya kendaraan		3 unit		2 unit	40.000.000	1 unit	227.000.000	-		6unit	267.000.000	
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			-		-	1 keg	45.000.000	-	-		1 keg	45.000.000	
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan rumahtangga	Terpenuhinya peralatan Kantor		-		-	1 keg	45.000.000	1 keg	39.000.000	1 keg	9.000.000	3 keg	54.550.000
Pembangunan pagar	Pengadaan pintu pagar		-		-	-	-	-	-		-	-	
Pengadaan Mebeleer	Terpenuhinya perlengkapan		-		-	-	-	-	-		-	-	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung		-	-	-	-	1 keg	85.300.000	-	-		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor		3unit	33.000.000	1 keg	15.000.000	1 keg	13.000.000	1 keg	15.000.000	3 keg	76.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Terpeliharanya kendaraan dinas		12 bh	26.000.000	12 bl	13.000.000	12 bh	11.000.000	12 bl	15.000.000	72 bl	65.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan dan peralatan kantor dan rumah tangga	Terlaksananya Jasa service		12 bl	19.900.000	12 bl	10.000.000	12 bl	9.000.000	12 bl	10.000.000	60 bl	48.900.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada
			capaian	Rp	capaian	Rp	capaian	Rp	target	Rp	Rp
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	% Kehadiran ASN Tepat Waktu	70	70	14.800.000	75	15.000.000	80		85		
Program Peningkatan											
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari			-	-	25 bh	10.000.000	-	-	-	-	47.500.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelayanan	75	75	75		80		85		90		
Penyusunan Renstra, Renja		2.746.000	-	-	12 bl	5.000.000	12 bl	4.000.000	12 bl	6.000.000	15.000.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir		
			Capaian	Rp	capaian	Rp	capaian	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Penunjang Pemilihan Kepala		-	-	-	1 keg	9.800.000	-	-	-	-	-	1 keg	9.800.000
Fasilitasi Alokasi dana Desa (ADD)		12.570.000	1 keg	8.250.000	-	-	-	-	-	-	-	1 keg	8.250.000
Penyelenggaraan Musrenbang		19.000.000	1 keg	20.000.000	1keg	30.000.000	1keg	27.000.000	1keg	30.000.000	6 keg	107.000.000	
Monitoring dan Evaluasi APBDesa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir	
			Capaian	Rp	capaian	Rp	capaian	Rp	target	Rp	target	Rp
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Operasional media Center		-	-	-	12 bl	10.000.000	12 bl	10.000.000	12 bl	10.000.000	60bl	50.000.000
Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan di Wilayah Kecamatan		-	-	-	12 bl	75.000.000	12 bl	100.000.000	12 bl	100.000.000	60 bl	511.560.000
Fasilitasi PATEN (Pelayanan Terpadu		-	-	-	12 bl	55.000.000	12 bl	45.000.000	12 bl	21.000.000	60 bl	164.000.000
Pendataan Lembaga		-	1keg	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-1keg	15.000.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan	Data Capaian pada Tahun Anggaran	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir	
			Capaian	Rp	capaian	Rp	capaian	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Fasilitasi Penunjang Kegiatan	Jumlah faslitasi keagamaan yang dilaksanakan	-	12 bl	15.000.000	12 bl	40.000.000	12 bl	47.000.000	12 bl	47.000.000	72 bl	267.500.000
Fasilitasi Kegiatan UKS	Jumlah UKS yang dibina	-	1keg	10.000.000	-	-	-	-	-	-	1keg	10.000.000
Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	Jumlah KPMD yang aktif	-	1keg	21.000.000	-	-	-	-	-	-	1keg	21.000.000
Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah desa yang melaksanakan program	-	1 keg	10.000.000	-	-	-	-	-	-	1 keg	10.000.000
Monitoring dan Evaluasi Bergulir	Jumlah Desa yang menyampaikan	-	1 keg	10.000.000	-	-	-	-	-	-	1 keg	10.000.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir	
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Pmbinaan dan operasional hansip inti	Jumlah hansip inti yang dibina		- 1 keg	12..000.000	1 keg	10.000.000	1 keg	15.500.000	1 keg	15.500.000	6 keg	85.600.000
Peningkatan kerjasama dan koordinasi	Jumlah desa yang menyelenggarakan		- 1 keg	5..000.000	1 k3g	20.000.000	1 k3g	10.000.000	1 k3g	10.000.000	6 keg	62.400.000
Kegiatan Pembinaan	Jumlah Hansip yang aktif		- 1 keg	10..000.000								
Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Desa yang kondusif	20.000.000	1 keg	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-1 keg	10.000.000
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam	JUmlah perangkat desa yang kompeten	10.000.000	1 keg	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-1 keg	10.000.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
			Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada akhir		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Pelatihan aparaturn pemerintah desa dalam bidang	Jumlah aparat desa yang kompeten	10.000.000	1 Keg	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1 Keg	
Pemberdayaan lembaga masyarakat pedesaan	Jumlah lembaga desa yang aktif	10.000.000	1 Keg	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1 Keg	10.000.000
Fasilitasi perencanaan pembangunan dan partisipasi desa	Jumlah dok perencanaan desa yang disusun	10.000.000	1 Keg	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1 Keg	10.000.000

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Pamotan Tahun 2020-2021

No	Urusan /Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
					Tahun 2020		Tahun 2021	
					target	Rp	target	Rp
1	2	3	4		5	6	7	8
I	Urusan Umum							
1	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah					801.788.400		1.674.000.000
			Persentase ketercapaian pelayanan umum	%	90.00		95	
			Persentase Ketercukupan sarana dan Prasarana Aparatur	%	90.00		95	
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	%	90.00		95	
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Keuangan	%	90.00		95	
		Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	100.00		100.00 %	
		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah ketercukupan sarana dan prasarana aparatur	dokumen	3		3	
		Peningkatan kualitas sumber	Jumlah dokumen kepegawaian yang dikelola dengan baik	dokumen	3		4	

No	Urusan /Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
					Tahun 2020		Tahun 2021	
					target	Rp	target	Rp
1	2	3	4		5	6	7	8
		daya aparatur						
		Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	dokumen	3		3	
2	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase keselarasan perencanaan terhadap Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	65	13.500.000	70	12.000.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun	dok	3			
		Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun	%	2			
3	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik		Persentase informasi yang disampaikan ke publik	%	90	5.000,000	95	3.000.000
		Pengelolaan keterbukaan informasi publik	Jumlah informasi yang disampaikan ke publik	informasi	2		2	
II	Penunjang Pemerintahan Kecamatan							

No	Urusan /Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
					Tahun 2020		Tahun 2021	
					target	Rp	target	Rp
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat					332.410.000		980.000.000
			Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan	Nilai	6.00 nilai		7.00 nilai	
			Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Nilai	6.00 nilai		7.00 nilai	
			Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat	Nilai	6.00 nilai		7.00 nilai	
			Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban		6.00 nilai		7.00 nilai	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase pemerintah desa yang tertib administrasi	%	90		95	
			Persentase pemerintah desa yang lunas bayar PBB		90		95	
		Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase pelaksanaan pembangunan secara swakelola		95		100	
			Persentase penetapan APBDes tepat waktu		95		100	
		Fasilitasi Peningkatan	Persentase lembaga kesejahteraan		95		100.00	

No	Urusan /Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
					Tahun 2020		Tahun 2021	
					target	Rp	target	Rp
1	2	3	4		5	6	7	8
		Kesejahteraan Masyarakat	masyarakat desa/kelurahan yang aktif					
		Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase penyelesaian permasalahan K-3 (Ketertiban, ketentraman dan keindahan)		95		100.00	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bab ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Kecamatan Pamotan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Pamotan yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PAMOTAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2016-2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian			Target	Capaian Akhir 2019
				2016	2017	2018	2019	
	1	2	3	4	5	6	6	7
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik Kecamatan Pamotan	IKM Kecamatan Pamotan	Angka	30	35	40	75	77,07
2	Meningkatkan Kinerja dan kapasitas pemerintah Desa	% Desa maju & mandiri	%	1	2	3	4	4,76
3	Meningkatkan Pemberdayaan	% Desa dengan nilai swadaya Masyarakat	%	35	40	45	50	50

	Masyarakat Desa	lebih dari Rp.5 jt						
--	-----------------	--------------------	--	--	--	--	--	--

Tabel 7.2.
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PAMOTAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Tahun 2020-2021

Misi I : “Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah”

Tujuan : “ Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan “.

NO	INDIKATOR UTAMA	TARGET KINERJA		CAPAIAN AKHIR RPJMD
		TH. 2020	TH. 2021	
1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	85	85

Tabel 7.3.
INDIKATOR KINERJA SASARAN KECAMATAN PAMOTAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Tahun 2020-2021

Misi I : “Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah”

Sasaran : “Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan.”

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		CAPAIAN AKHIR RPJMD
		TH. 2020	TH. 2021	
1	2	3	4	5
1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	2	2,25	2,25

Tabel 7.4.
INDIKATOR KINERJA PROGRAM KECAMATAN PAMOTAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2020-2021

Program : Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun		Target Akhir RPJMD
			2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun		Target Akhir RPJMD
			2020	2021	
3	Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan	Angka	6	7	7
4	Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Angka	6	7	7
5	Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat	Angka	6	7	7
6	Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Angka	6	7	7

BAB VIII P E N U T U P

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pamotan Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang harus dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2021. Dokumen ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Rembang untuk pembangunan daerah 5 tahun ke depan.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Pamotan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Perubahan Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang. Dengan melaksanakan Perubahan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Pamotan dan pemerintah desa di wilayah Kecamatan Pamotan, karena akan menentukan keberhasilan capaian program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Perubahan Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Rembang, 13 Agustus 2020

BUPATI REMBANG

ABDUL HAFIDZ

